

H A R I A N

LENTERAInspirasi Perubahan **TODAY**HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

EDISI JUMAT / 03 Juli 2020

It matters not what
someone is born, but
what they grow to be

J.K. Rowling, Novelis

**PASIEN SURABAYA
BAKAL DIKIRIM
KE PULAU GALANG
ADA APA?**

Ledakan kasus Covid-19 kembali terjadi di Indonesia dan lagi-lagi Jawa Timur (Jatim) menjadi pemicu terbesarnya. Surabaya sebagai wilayah paling 'merah' pun tampaknya mulai kewalahan menangani wabah ini. Apalagi di sisi lain, jumlah tenaga kesehatan juga makin berkurang dengan banyaknya korban meninggal dari kalangan 'garda terdepan' ini. Pemerintah pusat melalui Menko PMK Muhadjir Effendy melontarkan rencana pengiriman pasien dari Kota Pahlwan ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) di Pulau Galang, Riau. Sudah disiapkan sekitar 200 tempat tidur. Sinyal bila kondisi Surabaya tidak baik-baik saja menguat dengan kehadiran mendadak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ada apa ini?

*Baca Hal 11***RS CORONA
DI PULAU GALANG**

- 8.000 ha Luas
- 17.183 jiwa populasi penduduk
- 7 km dari pulau Batam

ALASAN MEMILIH PULAU GALANG

- Bekas bangunan RS pengungsian Vietnam
- Tersedia aliran listrik dan suplai air
- Jarak yang aman dari pemukiman warga
- Terhubung dengan bandara Hang Nadiem Batam
- Terhubung dengan Pelabuhan Sijantung, Pelabuhan Batu Ampar pulau Batam

FASILITAS

- Rp.400 miliar setimasi kebutuhan anggaran
- 900 ranjang kapasitas ruang perawatan
- 80 ranjang kapasitas ruang perawatan isolasi bertekanan negative
- 20 ranjang kapasitas ruang Inensive Care Unit

UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	59,394	26,667	2,987
<i>Seluruh Dunia</i>	10,704,228	5,489,399	516,434

Update : 02 Juli 2020 Pukul 15.55 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins**TIGA REKOR CORONA RI 2 JULI 2020**

- Jumlah spesimen yang diperiksa 23.519 orang
- penambahan kasus positif 1.624 (total 59.394 orang)
- Penambahan pasien sembuh 1.072 orang (total 26.667 orang)

MENYOAL SURAT PERMINTAAN SUMBANGAN CORONA KE PEGAWAI PEMKOT SURABAYA: WUJUD EMPATI, SAH SAJA KAN?

Surabaya- Beredarnya surat berkop Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berisi permintaan agar pegawai di Kota Pahlawan menyumbang untuk penanganan Covid-19 menghebohkan publik. Pasalanya, secara postur anggaran Surabaya memiliki APBD 2020 tertinggi di Jatim, yaitu Rp 10,3 triliun. Bahkan Pemkot menganggarkan dana sebesar Rp 196 miliar untuk penanganan wabah ini.

Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan tak menampik kebenaran tersebut, "Iya memang benar kok itu suratnya. Sah-sah saja kan. ujanya saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Kamis (2/7). Ajakan itu sesuai surat yang ditandatangani Hendro Gunawan Sekretaris Daerah Kota Surabaya pada 30 Juni 2020 dengan Nomor 360/5769/436.3.4/2020 tentang Bantuan Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Hendro mengatakan bahwasanya penggalangan dana yang dilakukan adalah wujud empati untuk masyarakat Surabaya dari lingkungan Pemkot Surabaya. "Kami sudah sering kok begitu makanya kadang kami buka posko untuk penerimaan. Tidak hanya saat pandemi, termasuk waktu gempa bumi dan lainnya. Dari swasta juga berkenan nyumbang, asal ikhlas, insyaallah bermanfaat," jelasnya.

Kegiatan ini, lanjut Hendro tidak ada

paksaan. Jadi donasi yang dilakukan oleh karyawan/karyawati ASN/Non-ASN di pemkot diberikan secara suka rela. Surat itu juga ditujukan kepada para pegawainya di lingkungan Perusahaan Daerah, RSUD, Puskesmas.

Hendro juga membantah Ketika ditanya soal apakah anggaran dana refocusing dari APBD Surabaya untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 196 miliar sudah habis. "Belum habis dananya. Karena banyak yang support dari berbagai pihak untuk penanganan Coronaini," ujarnya.

Hendro mengatakan bahwa anggaran yang sudah diserap tidak banyak. Untuk nominal berapa persennya data tersebut dimiliki oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD). "Penyerapan dari refocusing nggak banyak sampai saat ini. Soalnya sudah banyak terbantu dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan bantuan masyarakat. Lagi pula dana besar bukan ukuran apakah kegiatannya besar juga. Yang jelas harus efisien dan efektif," pungkasnya.

Sementara itu, Herlina Harsono Njoto Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Surabaya berpendapat penggalangan dana bagi ASN Pemkot Surabaya itu wajar. Karena dalam kondisi wabah Covid-19 ini



butuh partisipasi ekstra dari semua pihak.

Dia mengatakan, antara APBD dan penggalangan bantuan itu konteksnya berbeda. Karena penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 masih terus jalan. Sehingga, penggalangan dana yang sifatnya imbauan itu diharapkan bisa juga bermanfaat untuk masyarakat. (ist)

SALING LEMPAR TERKAIT DUGAAN PERMAINAN PPDB DI KOTA BLITAR

Blitar - Pihak-pihak terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Kota Blitar saling lempar, mengenai dugaan permainan jalur zonasi menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) abal-abal.

Mulai Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Blitar, pihak komite SMP Negeri 1 Kota Blitar dan Dispendukcapil Kota Blitar semuanya saling lempar.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Blitar, Ramli mengatakan tidak memiliki urusan terkait dugaan permainan perubahan KK ataupun SKD dalam PPDB.

"Terkait perubahan KK dan SKD merupakan kewenangan Pemkot Blitar, karena kami tidak dapat menerbitkan atau merubah KK. Kita hanya melaksanakan PPDB," ujar Ramli ketika dikonfirmasi wartawan.

Lebih lanjut dijelaskan Ramli panitia PPDB SMA Negeri Kota Blitar tidak dapat memanipulasi data, karena seluruh proses PPDB dilakukan secara online langsung terhubung dengan server pusat. "Sehingga panitia PPDB tidak dapat melakukan manipulasi data, yang menjadi syarat utama dalam PPDB jalur zonasi," jelasnya.

Dengan tegas Ramli membantah adanya oknum dari panitia PPDB yang bermain dengan melakukan perubahan KK atau SKD berasal dari Panitia PPDB, server pusat yang menentukan batas jarak antar sekolah dan alamat calon siswa. "Oknumnya siapa? Bukan dari Cabang Dinas Pendidikan, karena kami

telah melakukan proses PPDB sesuai dengan SOP dan juknis tahun ajaran 2020/2021 serta pasti ada evaluasi untuk kedepannya," terangnya.

Demikian juga Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar, Imam muslim mengatakan perubahan KK menyesuaikan dengan pemohon, jika ada perubahan elemen data. "Ada beberapa jenis pemohon yang melakukan perubahan KK, mulai dari perubahan domisili hingga perubahan status. Jadi kita cetak atau menerbitkan KK sesuai dengan menyesuaikan data pemohon," kata Imam.

Diakui Imam pihaknya tidak dapat mengetahui tujuan perubahan KK untuk syarat PPDB, karena pengajuan perubahan KK dilakukan secara online dan akan diproses apabila persyaratan terpenuhi. "Yang jelas kalau ada pemohon syaratnya lengkap, kita proses dan cetak. Tapi kalau digunakan untuk persyaratan PPDB kita tidak tahu," elaknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hal ini mencuat berawal dari pengaduan yang diterima anggota DPRD Kota Blitar. Dimana dalam proses PPDB Online untuk SMA jalur zonasi, diduga terjadi permainan dengan modus menggunakan SKD abal-abal. Dengan tujuan bisa pindah domisili, agar dekat dengan sekolah SMA yang dituju.

Sementara itu Wakil Ketua Komite SMPN 1 Kota Blitar, Yuda Nur Kholis didampingi Ketua Komite, Tri Basuki membantah adanya



permainan oknum komite, dalam pengaturan persyaratan PPDB SMA. Pihaknya hanya memberikan saran dan masukan pada siswa dan wali murid agar dapat diterima di SMA tujuan. "Kita tidak menyediakan surat atau dokumen lain, kita hanya memberikan masukan dan saran agar diterima di SMA Negeri yang dituju," paparnya.

Selain jalur zonasi, juga ada penerimaan jalur lainnya yaitu jalur prestasi dan nilai raport untuk PPDB. Sedangkan, siswa yang ingin masuk ke SMA tersebut namun jaraknya tidak mencukupi maka diarahkan untuk mendekati ke zona sekolah. "Semua kita arahkan, yang punya prestasi silahkan menggunakan dua jalur prestasi dan raport. Kemudian, siswa lain diarahkan mendekati ke SMA itu," kata Yuda.

Karena ditambahkan Yuda jarak zonasi tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, tahun lalu 1.171 meter sedangkan tahun ini 1.093 meter. "Sekali lagi kita hanya mengarahkan saja, tidak ada mengatur persyaratan baik itu KK maupun SKD. Digunakan atau tidak saran tersebut terserah wali murid," pungkasnya. (ais)

SISTEM PPDB SMPN SURABAYA RUWET, WALI MURID DEMO KE DPRD

Surabaya – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi isu panas di berbagai wilayah Indonesia. Kini giliran wali murid calon siswa SMP di Surabaya 'ngeluruk' DPRD untuk protes sistem domisili pada jalur zonasi yang dinilai merugikan warga asli sekitar.

Dari pantauan, belasan wali murid tersebut melakukan orasi sebagai bentuk ketidakpuasan dengan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada PPDB SMPN. Mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan antara lain 'Wakil Rakyat Harus Peduli Pendidikan, Kehidupan sudah sulit pendidikan jangan dipersulit'

"Tidak sesuai, sedangkan kita datang ke Kepala Sekolah minta data domisili tidak dikasih. Harapan kami dan imbauan kami, minta tolong ada sekolah, tapi kita tidak bisa menikmati, jangan orang yang jauh menikmati," kata Indah Sutoko salah satu wali murid saat aksi di DPRD Kota Surabaya, Kamis (2/7).

Namun, aksi demo tidak berlangsung lama. Anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D yang membidangi pendidikan segera menemui mereka dan menampung semua aspirasi para pendemo. Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah bersama dengan anggota lain yakni Akmarawita Kadir dan Hari Santosa

menemui dan menampung aspirasi mereka.

"Saya menerima cukup baik aspirasi bapak ibu. PPDB ini, sistem zonasi baru tahun kedua. Kita tahu saat ini masa pandemi semua pada keterbatasan. Termasuk niat kita ingin berkomunikasi harus via WA," ungkap Khusnul.

Dalam kesempatan tersebut, Khusnul juga menyampaikan jika Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menyediakan sepuluh nomor online yang bisa diakses oleh wali murid untuk melakukan pengaduan. "Kami menerima masukan ini, nanti akan kami rapatkan," tandas Khusnul.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan dia juga banyak menerima keluhan dari warga Kecamatan Sawahan, Kenjeran, dan Wonokromo. Mayoritas mereka mengeluhkan karena anaknya tidak diterima lewat sistem zonasi.

"Karena memang wilayah Kelurahan Banyurip, Petemon, dan Putat Jaya itu SMP Negeri yang ada di sekitar situ hanya ada SMPN 10 Dukuh Pakis. Sementara SMPN 25 ada di wilayah Sukomanunggal," papar Reni Astuti.

Karena itu, menurut politisi perempuan PKS ini, sampai kapan pun kalau kondisinya seperti ini tidak pernah bisa masuk ke SMP negeri. "Saya tidak menyalahkan warga yang masih punya orientasi karena



Wali murid di Surabaya demo di kantor DPRD memprotes ruwetnya PPDB SMPN

sekolah negeri dianggap pembiayaannya tidak ada," terang Reni Astuti. Dia menambahkan masyarakat yang datang ke gedung DPRD Surabaya ini mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anak mereka tidak diterima lewat jalur zonasi maupun jalur prestasi.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mengatakan akan memfasilitasi putra-putri yang tidak bisa masuk ke SMP Negeri melalui PPDB. Dindik berjanji menyiapkan SMP Swasta gratis. Progam tersebut akan diberikan kepada warga yang masuk dalam kategori Mitra warga dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang tidak lolos dalam PPDB. Namun, mekanisme dan kuotanya telah ditentukan. (ist,ard)

SOAL PENGGANTI KAPOLRI IDHAM AZIS, DPR: FADIL IMRAN, NANA SUDJANA, LISTYO SIGIT



Irjen Nana Sudjana



Komjen Listyo Sigit Prabowo



Irjen Pol Mohammad Fadil Imran

Jakarta- Sekitar 6 bulan lagi, Kapolri Jenderal Idham Azis akan diganti orang baru. Diapun mulai membicarakan calon pengganti dirinya kelak saat memasuki masa pensiunan di bulan Januari 2021. Anggota DPR RI pun ikut berspekulasi siapa calon yang layak meng-gantikannya.

Sebagai mitra dari kepolisian, Anggota Komisi III Jazilul Fawaid beranggapan bahwa ke depan dibutuhkan sosok Kapolri yang cekatan. Apalagi, dalam membantu pemulihan di masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dia menekankan tugas kepolisian dalam mengayomi hingga menjaga ketertiban.

"Nah kriteria yang cocok karena ini perlu besok masih akan menghadapi pandemi yah tentu calon kapolri yang cekatan dan dapat membantu pemulihan keadaan masyarakat dan ketertiban karena tugas setelah Pak Idham ini ada faktor eksternal sangat berpengaruh yaitu pandemi," kata Jazilul, Kamis (2/7). "Ka-

rena krisis kesehatan ini kalau tidak bisa tertangani dengan baik maka akan terjadi lagi. Tantangan berat," imbuhnya.

Sejauh ini, dia menyebut ada banyak calon yang dianggap potensial untuk menjadi Kapolri baru. Dia mencontohkan seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran hingga Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Saat ini, mereka terbukti mampu menimbang tugasnya dengan baik "Banyak tuh calon penggantinya. Minimal jajaran eselon satu. Terus kapolda. Tinggal sekarang membantu Kapolri sekarang ini agar membuktikan kinerja mana yang terbaik akan mendapatkan apresiasi presiden, kepolisian dan masyarakat," ujarnya.

"Seperti ada Kapolda Metro DKI, Kapolda Jatim. Ini kan menjadi takaran saja nanti. Mereka kan ada di daerah daerah besar yah. Di Jateng juga. Di samping itu ada eselon satu seperti Kabareskrim be-

gitu," lanjutnya.

Kendati demikian, Politikus PKB ini berharap jika nanti proses peralihan Kapolri tak menimbulkan kegaduhan. Sebab, di bulan Desember mendatang akan ada kontestasi politik besar seperti Pilkada. "Maka perlu dicermati betul apakah peralihan pergantian dan suksesi dari proses itu harus tidak menimbulkan hiruk pikuk karena akan ada momen nasional yaitu pilkada. Itu tak mudah, bercampur antara pandemi dan pilkada serentak," ujarnya.

Hingga saat ini, meski isu pergantian mulai menjadi perbincangan di masyarakat namun dia mengakui bahwa di Komisi III sendiri belum ada pembahasan sama sekali. Hal ini karena mereka masih sibuk dalam penanganan pandemi Covid-19. "Kalau itu belum karena kita harus tahu yang dibutuhkan pada masyarakat masih penanganan COVID-19," pungkasnya. (Ist)

PANTAU COVID-19, POLRES MADIUN KENALKAN APLIKASI 'MASMAS'

Madiun- Memperingati HUT Bhayangkara yang ke 74, Kepolisian Resor Madiun meluncurkan inovasi aplikasi canggih bernama MasMas. Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto mengatakan aplikasi ini berfungsi untuk memantau perkembangan penanganan kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Madiun.

"MaSMaS ini singkatan 'Madiun Sehat Masyarakat Sejahtera. Terinspirasi karena kita lagi menghadapi pandemi Covid-19 yang fungsinya untuk memonitor perkembangan kasus corona di Kabupaten Madiun," ujarnya, Kamis (2/7).

Eddy menambahkan jika aplikasi ini sudah dapat di unduh melalui Google Playstore jika pengguna menggunakan android. Dengan aplikasi MasMas, warga bisa melihat peta penyebaran virus secara detail. Mulai dari status zona hingga berapa banyak pasien ODP, PDP maupun positif Covid-19 di Kabupaten Madiun.

Keunggulan lain, kata Kapolres, aplikasi ini juga dilengkapi fitur Video Conference (Vidcon) dengan para pasien. Hal tersebut tentunya bisa mempermudah bagi keluarga

yang ingin memantau kondisi pasien. "Apa saja yang dilakukan selama masa karantina maupun isolasi serta pengobatan dan perawatan apa yang telah dilakukan bisa dipantau lewat sini. Sehingga memudahkan petugas untuk memantau," ujarnya.

Kapolres berharap dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah komunikasi keluarga dengan pasien. Karena selain digunakan untuk personal aplikasi MasMas juga bisa dipergunakan untuk layanan umum bersama Bhabinkamtibmas. Kegiatannya pun secara otomatis akan termonitor di MCC Polres Madiun setiap hari. Mulai dari kegiatan penyuluhan, sosialisasi, maupun sambang warga.

"Semua harus dilaporkan dan tidak bisa dibohongi, karena akan terupdate terus semua bentuk kegiatan Bhabinkamtibmas tersebut," tambahnya.

Aplikasi tersebut untuk sementara khusus di wilayah hukum Polres Madiun. Harapannya melalui inovasi itu dapat mewujudkan Madiun yang sehat, penyebaran COVID-19 terpantau, segera berakhir, dan muaranya warga Madiun yang sejahtera.



Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto

Dalam peluncuran aplikasi tersebut, Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto didampingi Bupati Madiun Ahmad Dawami, Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Waris Ari Nugroho, dan Dandim 0803 Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto.

Sesuai data Gugus Tugas Kabupaten Madiun, kasus positif COVID-19 di wilayah setempat hingga Rabu (1/7/2020) terdapat 35 orang. Dari jumlah 35 orang tersebut, sebanyak 30 orang dinyatakan sembuh, sisanya dalam perawatan. (Sur)

RATUSAN MASSA PDIP LONG MARCH, BERI KEJUTAN POLRES BLITAR KOTA

Blitar - Ratusan massa kader, simpatisan dan pengurus PDIP Kota Blitar berjalan kaki (long march), mendatangi Mapolres Blitar Kota untuk menyampaikan aspirasi dan kejutan. Selain mengucapkan Selamat HUT Bhayangkara Ke-74, massa menuntut pengusutan tuntas pelaku aksi pembakaran bendera partai PDIP.

Dengan dikomando langsung Ketua DPC PDIP Kota Blitar, dr Syahrul Alim ratusan massa yang berkumpul di Kantor DPC PDIP Kota Blitar Jl. Dr Wahidin, berjalan menuju Mapolres Blitar Kota di Jl. PB Sudirman yang berjarak sekitar 1 kilometer.

Sebanyak 7 orang perwakilan massa, diantaranya Ketua dan Sekretaris DPC PDIP dan beberapa pengurus lainnya dipersilahkan masuk, untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Kapolres Blitar Kota.

Namun karena Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela masih Vidcon dengan Kapolda, perwakilan massa diterima Wakapolres Blitar Kota, Kopol Nur Halim di Ruang Command Center Polres Blitar Kota.

Dalam dialog tersebut Syahrul pertamanya mengucapkan Selamat HUT Bhayangkara Ke-74, serta menyampaikan tujuan datang ke Mapolres Blitar Kota untuk meneruskan aspirasi DPC PDIP Kota Blitar. "Yakni mendukung polisi mengusut tuntas, pelaku aksi pembakaran ben-



Kader, simpatisan dan pengurus PDIP Kota Blitar mendatangi Mapolres Blitar Kota untuk mengucapkan HUT Bhayangkara sekaligus meminta pengusutan tuntas aksi pembakaran bendera partai

der partai PDIP pada saat aksi demo di Jakarta beberapa hari lalu," tutur Syahrul, Kamis (2/7).

Selanjutnya diserahkan surat aspirasi DPC PDIP Kota Blitar, untuk disampaikan kepada Kapolri melalui Polres Blitar Kota. Sebelum mengakhiri pertemuan, ternyata perwakilan massa PDIP Kota Blitar tadi sudah menyiapkan kejutan untuk Polres Blitar Kota. Yaitu diberikan kue tart HUT Bhayangkara Ke-74 dan rangkaian bunga, yang diterima Kopol Nur Halim. Bahkan tidak hanya diserahkan, kue tart yang lengkap dengan lilinnya tersebut juga dinyalakan dan dipotong bersama.

Usai menerima perwakilan dari DPC PDIP Kota Blitar, Wakapolres Blitar Kota Kopol Nur Halim mengatakan akan meneruskan aspirasi ini ke Kapolri, sesuai dengan apa yang disampaikan. "Terkait

dengan dukungan untuk mengusut tuntas, adanya peristiwa pembakaran bendera partai di Jakarta beberapa waktu lalu," kata Kopol Nur Halim.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Kota Blitar, dr Syahrul Alim sebelum mengajak massa kembali ke Kantor DPC PDIP mengatakan kedatangan ke Mapolres Blitar untuk memberikan dukungan dan menuntut polisi mengusut tuntas, aksi pembakaran bendera dan menangkap pelakunya. "Karena aksi terserbut merupakan tindakan provokasi yang bisa memecah belah bangsa, oleh karena itu kami minta warga PDIP di seluruh Indonesia tidak terpancing tetap menjaga perdamaian Indonesia dan menyerahkan kepada polisi untuk mengusutnya," papar pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Blitar ini. (ais)

BAWASLU: SEMUA ODP, PDP & PASIEN COVID-19 BOLEH NYOBLOS

Jakarta- Di tengah pandemi Covid-19 Pilkada serentak 2020 bakal diselenggarakan 9 Desember nanti. Diprediksi masih akan ada masyarakat yang berstatus penderita positif corona, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang Dalam Pengawasan (ODP) saat itu.

Sebab hingga saat ini saja, per 2 Juli 2020, jumlahnya ada 40.778 ODP yang diawasi dan 13.359 PDP yang dipantau. Total terkonfirmasi positif bertambah 1.624 kasus sehingga total menjadi 59.394.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengatakan, semua warga negara Indonesia yang memiliki hak suara, termasuk mereka yang terinfeksi corona, boleh memilih atau menggunakan hak politiknya pada Pilkada Serentak 2020. "Mereka masih bisa memilih dan bisa salurkan suaranya," kata dia.

Fritz menjelaskan, setiap pemilih yang ingin masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menjaga protokol kesehatan. Mereka akan dicek suhu tubuhnya, jika di bawah 37 derajat, maka pemilih tersebut bisa mencoblos di TPS.

Namun, kata Fritz, sebaliknya jika suhu badan di atas 37 derajat, maka pemilih tidak diperkenankan mencoblos dan diarahkan ke bilik khusus, yang didalamnya terdapat petugas-petugas yang mengenakan hazmat.

"Dan juga jangan dilupakan bahwa mungkin ada di sebuah daerah yang ada ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), OTG (Orang Tanpa Gejala) maupun orang yang benar-

benar positif Covid-19," kata Koordinator Komisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu itu.

Alternatif lain, kata Fritz, petugas bisa juga keliling menggunakan baju hazmat di tempat-tempat terdapat pemilih, namun mereka termasuk ODP, PDP, atau positif Covid-19.

Fritz mengatakan meskipun seorang pemilih terkena ODP atau PDP maupun positif Covid-19 tengah menjalani isolasi mandiri, mereka dijamin tidak akan kehilangan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

"Jadi selama ini yang kami selalu lakukan sama dengan Bawaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum), tapi kan ini juga tugas bersama kita, tugas kawan-kawan di media, tugas-tugas di Pemda, tugas juga Kominfo dan Mendagri, dan terus kita semua, sehingga ini adalah agenda nasional kita, agenda atau perintah dari Undang-Undang Dasar untuk melaksanakan Pilkada," kata dia.

Meskipun Bawaslu dan KPU sudah melakukan berbagai kegiatan melalui pengawasan partisipatif, dan melakukan sosialisasi menggunakan media sosial, serta daring, dia yakin ada saja masyarakat yang tak berani ke TPS karena pandemik. Alhasil, partisipasi pemilih diprediksi akan menurun. "Ini kan karena kita masih mempersiapkan semuanya dalam proses, dan meyakinkan pemilih juga salah satu yang paling penting dalam proses persiapan untuk Pilkada 2020," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa pemilih dengan



Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI
Fritz Edward Siregar

suhu tubuh lebih dari 38 derajat celsius tidak akan diperkenankan melakukan pencoblosan saat Pilkada 9 Desember mendatang.

Melalui keterangan resmi yang dimuat 1 Juli kemarin, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa tahapan Pilkada akan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan terkait protokol kesehatan.

KPU akan menerapkan Keputusan Menteri No. HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang batasan suhu tubuh. Beleid ini menyatakan bahwa suhu tubuh lebih 38 derajat celsius dikategorikan sebagai orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan.

Regulasi lainnya adalah Permenkes No. HK.01.07/382/2020 yang menyatakan batasan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan memasuki tempat dan fasilitas umum. (ist)

MUMTAZ RAIS MUNDUR DARI PILKADA SLEMAN, PAN DIY MENGAKU BARU TAHU

Yogyakarta - Ahmad Mumtaz Rais membuat kejutan dengan menyatakan mundur dari pencalonan Pilkada Sleman 2020. Padahal sebelumnya, putera ketiga Amien Rais itu telah mengantongi rekomendasi dari DPP PAN. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun mengaku belum mendapat kabar terkait mundurnya Mumtaz Rais dalam kontestasi Pilkada Sleman 2020. DPW menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada DPP PAN.

"Saya malah baru tahu ini kalau dia (Mumtaz) mundur," kata Ketua DPW PAN DIY, Nazaruddin dikutip Kamis (2/7). Terkait sikap dari DPW PAN DIY dengan pengunduran Mumtaz tersebut, Nazaruddin mengaku menyerahkannya kepada DPP PAN. Hal itu karena DPP yang mengeluarkan rekomendasi.

"Ya saya menyerahkan ke DPP (PAN) karena kewenangan itu (pemberi rekomendasi) ada di DPP. Karena secara prinsip DPP lah yang memberi dukungan kepada siapa, karena itu kewenangan DPP ya kita ikuti," ucapnya.

Namun, dia menilai mundurnya Mumtaz seyogianya diketahui terlebih dahulu oleh DPD PAN Sleman maupun DPW PAN DIY. Mengingat Mumtaz sebelumnya disaring oleh DPD PAN Sleman. "Ya mestinya dia menyampaikan ke semua elemen partai karena kemarin dijaring oleh DPD, dan DPD menyampaikan ke DPW, terus kemudian disampaikan DPP yang sebelumnya sudah memberikan rekomendasi (ke Mumtaz)," ucapnya. Kendati demikian, Nazaruddin tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut. Karena yang terpenting publik sudah mengetahui bahwa Mumtaz Rais mundur dari kontestasi Pilkada Sleman.

Mumtaz sendiri mengaku lebih memilih untuk fokus berkarier di DPP PAN. "Menyikapi Pilkada 2020, memang sudah terlihat petanya semakin terlihat jelas dan terang benderang, di mana di sini saya sepertinya memutuskan untuk lebih mendukung calon siapa yang nanti menang di Sleman," katanya.

Mumtaz menjelaskan alasan dirinya mundur dari Pilkada Sleman, yakni tak lepas dari penunjukan dirinya sebagai



Ahmad Mumtaz Rais, Ketua POK DPP PAN

Ketua Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN. Mumtaz mengaku mandat menjadi Ketua POK DPP PAN berat. "Setelah saya ditunjuk oleh Ketua PAN (Zulkifli Hasan) menjadi Ketua Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) sebulan yang lalu, itu kan tugasnya berat. Termasuk Pilkada 2020 ini menjadi urusan POK," kata Mumtaz.

Mumtaz mengaku posisinya yang baru di partai berlambang matahari itu cukup berat. Dia mengaku tak bisa membagi tugas antara kampanye Pilkada Sleman dan tugasnya di DPP. (ist)



TUJUAN WISATA BERBASIS ALAM JADI INCARAN MASA DEPAN

Foto : Unsplash.com/Bernard Hermant

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyiapkan protokol kesehatan Covid-19 terhadap destinasi-destinasi wisata berbasis alam di Indonesia.

Langkah ini ditujukan untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal di era kenormalan baru, setelah industri pariwisata merosot selama pandemi.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Kosmas Harefa mengatakan, penerapan protokol kesehatan itu akan mengutamakan prinsip Cleanliness, Health, and Safety (CHS).

"CHS ini diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia paska covid-19," katanya dalam siaran pers yang dikutip Bisnis.

Menurutnya, destinasi wisata berbasis alam memiliki risiko penularan yang lebih rendah dibanding dengan destinasi wisata di perkotaan yang biasanya mengundang kerumunan orang.

Meski demikian, dia menyatakan tidak ingin risiko penularan yang minim ini disepelekan. Karenanya, pemerintah ingin memastikan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata berbasis alam telah dilengkapi sarana pendukung.

"Ketika fasilitas tidak mendukung, kita promosi kemanapun orang tidak akan percaya. Kuncinya adalah cleanliness, health, safety. Kita harus

membangun kepercayaan orang untuk berwisata ke tempat kita," tambahnya.

Dia melanjutkan pengoptimalan destinasi wisata berbasis alam akan berkontribusi pada perekonomian daerah. Saat wisatawan datang, maka lapangan kerja tercipta.

Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata, pemerintah bahkan mengucurkan stimulus dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor pariwisata sebesar Rp3,8 triliun untuk membangun destinasi berkualitas.

"Pemerintah juga menstimulasi perjalanan wisata domestik dengan meluncurkan program wisata In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epic Sale. Tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari wisata domestik yang semula hanya 55 persen menjadi 70 persen," katanya lagi.

Pariwisata bahari terpukul

Dari seluruh sektor pariwisata, bahari adalah salah satu yang terpukul pandemi covid-19. Survei yang dilakukan Persatuan Usaha Selam Indonesia (PUSI) terhadap 152 pelaku usaha yang tersebar di lokasi destinasi prioritas wisata bahari menyebutkan, sebanyak 66,2 persen pelaku di sektor ini menghentikan operasi selama pandemi. Sementara itu, 93 persen responden mengaku sudah tidak memiliki pemasukan.

Kerugian yang timbul akibat Covid-19 mencapai Rp75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. 44 persen pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26 persen dirumahkan dengan

tanggungan, dan 4,5 persen terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.

Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru, membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Dia mencontohkan, pengembangan wisata bahari berbasis desa yang tengah digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya yakni wisata mangrove hingga taman coral. Destinasi wisata bahari berbasis desa ini mendorong agar perekonomian desa berputar sebagai imbas dari kunjungan wisatawan.

Pengembangan wisata berbasis desa atau desa wisata bahari (Dewi Bahari) mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus berfungsi melestarikan ekosistem pesisir.

Selain itu, Dewi Bahari juga diharapkan mengubah perilaku masyarakat pesisir untuk lebih meningkatkan kesadaran sekaligus melestarikan budaya pesisir (Ist).



Foto : Unsplash.com/Dikaseva

DUCK SYNDROME,

Perilaku Ketika Sedang Diterpa Banyak Beban



AMBISI

KAYA

SUKSES

BERPRESTASI

Mungkin sebagian dari Anda ada yang memiliki teman yang hidupnya terlihat sukses dan banyak didambakan banyak orang. Lulus dari universitas ternama, mendapat pekerjaan di perusahaan yang bergengsi, dan di saat yang bersamaan tetap bisa berenang-senang di unggahan sosial mediana.

Namun, siapa sangka bahwa di balik itu semua ternyata teman Anda sebenarnya sedang diterpa banyak beban? Kerap disebut duck syndrome. Berikut penjelasannya.

Duck syndrome merupakan istilah yang mengacu pada sebuah perilaku di mana seseorang sebenarnya sedang dirundung banyak masalah tapi tetap tampak baik-baik saja dari luar.

Istilah ini pertama kali digunakan oleh Universitas Stanford dan agaknya telah menjadi persoalan di kalangan mahasiswanya. Sebutan duck syndrome diambil dari analogi seekor bebek yang sedang berenang.

Saat bebek berenang, orang-orang hanya melihat bagian atas tubuhnya yang melaju dengan tenang dan perlahan. Sedikit dari mereka yang tahu bahwa ada kaki yang terus-terusan bergerak tak menentu dengan susah payah di bawah air.

Mengapa bisa terjadi

Masa-masa di sekolah menengah bisa menjadi bakal munculnya duck syndrome. Bayangkan bila Anda adalah salah satu

murid terbaik di sekolah. Berbagai pujian dari guru dan teman-teman sudah menjadi makanan sehari-hari.

Kesuksesan tersebut pun membuat Anda merasa optimis dan semakin berambisi untuk menggapai prestasi yang lebih besar saat masuk ke perguruan tinggi nanti. Ada juga semacam beban yang mendorong Anda untuk mempertahankan citra sebagai murid teladan.

Sayangnya, masa perkuliahan tak semudah yang Anda bayangkan. Sistem pendidikan yang jauh berbeda, materi pelajaran yang lebih kompleks, serta tuntutan untuk membangun pertemanan yang luas demi masa depan nanti, semua hal itu akhirnya membuat Anda mulai merasa kewalahan.

Tak ada yang mau membahas tentang bagaimana sulitnya mengerjakan suatu tugas, tak ada yang mau mengaku bahwa ada yang baru saja dimarahi atasan karena alasan yang memalukan, duck syndrome membuat mereka berlaku seakan tak pernah mengalami kegagalan.

Selain itu, faktor luar juga bisa mendorong terjadinya duck syndrome. Beberapa di antaranya adalah kecenderungan orang-orang terdekat yang kerap mem-bangga-banggakan prestasi serta pola asuh helikopter.

Cara mengatasinya

Jika terus-terusan dibiarkan, perilaku ini bisa berakibat pada kebiasaan tak

sehat seperti mendorong tubuh untuk terus-terusan bekerja di luar kemampuan.

Bila Anda sudah mulai merasakan pertanda seperti yang sudah dijelaskan dan mulai terasa mengganggu kehidupan Anda, hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah menjalani psikoterapi atau terapi bicara.

Pilihan lainnya adalah terapi interpersonal, di mana Anda akan dibantu oleh terapis untuk membangun kemampuan dalam mengatasi emosi serta hal-hal yang menghubunginya secara efektif.

Mengingat duck syndrome bukanlah gangguan resmi, psikolog akan mengatasinya melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang menyertainya seperti gangguan kecemasan atau stres kronis.

Duck syndrome rentan menyerang mereka yang sedang berada di tengah perjalanan mengejar kesuksesan. Namun sebelum hal ini terjadi, Anda bisa melakukan pencegahan dengan mengikuti pelatihan untuk manajemen stres. Manfaatkan juga layanan kesehatan mental seperti konseling yang ada di sekitar Anda.

Yang terpenting adalah tanamkan pada diri Anda bahwa hidup tak selalu berjalan sempurna. Jadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk membentuk kemampuan yang lebih baik lagi. Niscaya, kesuksesan yang Anda raih bisa menjadi kepuasan untuk Anda (1st).

INI PENJELASAN PARA ILMUWAN, MENGAPA AIR LAUT BERWARNA BIRU



Foto : @Jannoon028

Seorang murid sekolah dasar di Neerim South, Australia, bertanya: apakah air benar-benar berwarna biru ataukah itu hanya pantulan dari langit?

Pertanyaan itu sungguh menjadi teka-teki yang kemudian mendorong penelitian fisika cahaya pada awal abad ke-20.

"Jawaban singkatnya adalah laut berwarna biru akibat cara air menyerap cahaya, cara partikel-partikel dalam air menghamburkan cahaya, dan juga karena sebagian cahaya biru dari langit dipantulkan."

Dalam laman The Conversation Indonesia, Justin Peter, ilmuwan cuaca dari Australian Bureau of Meteorology, menjelaskan lebih jauh mengenai hal tersebut:

Dalam penjelasan Fisika, terdapat beberapa fakta menarik tentang cahaya. Cahaya yang kita lihat merupakan cahaya putih yang terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut foton. Saking kecilnya, ukurannya lebih kecil dari atom.

Partikel ini terbilang aneh karena saat kita mengukurnya, bentuknya terlihat seperti bola kecil dan terkadang seperti gelombang.

Foton membuat cahaya putih dengan panjang gelombang yang berbeda. Ada

yang pendek dan panjang. Semuanya membentuk warna pelangi.

Foton dengan panjang gelombang terpendek menampilkan warna biru. Sedangkan foton dengan panjang gelombang yang terpanjang, berwarna merah.

Pada cahaya sinar matahari, foton mengalir dari matahari dan berinteraksi dengan benda-benda yang ada di bumi. Misalnya dedaunan yang berwarna hijau. Foton hijau memantul dan diserap oleh mata kita.

"Saat cahaya jatuh di suatu benda, beberapa foton akan diserap; beberapa foton akan memantul--kita menyebut ini menghambur," ucap Peter.

Lalu bagaimana air laut berwarna biru? Peter mengatakan bahwa air laut tidaklah murni.

Maksudnya, ia memiliki banyak hal yang larut di dalamnya. Seperti garam atau potongan makhluk yang telah mati.

Partikel-partikel itulah yang memantulkan sebagian cahaya sebelum sempat mengamburkan warna yang benar-benar biru. lalu, cahaya yang terhambur dari laut biasanya berwarna biru kehijauan.

Langit juga berperan terhadap warna laut menurut Peter. Karena biru langit dan laut memantulkan sebagian dari cahaya-

nya.

"Singkatnya: laut berwarna biru karena cara air menyerap cahaya, cara partikel-partikel dalam air menyebarkan cahaya, dan juga karena pantulan cahaya biru dari langit," tutur Peter.

Peter menambahkan bahwa posisi matahari juga menjadi faktor. Ketika matahari bersinar cerah maka laut tampak lebih biru ketimbang malam hari, tampak bila laut berwarna hampir hitam pada malam.

Dalam telaah lain disebutkan, terkadang laut tampak hijau. Ini karena laut menampung banyak tanaman atau alga dan bahan sedimen dari sungai yang mengalir ke laut.

Cahaya biru diserap lebih besar dan pigmen warna kuning dari tumbuhan bercampur dengan cahaya biru membuat air laut tampak berwarna hijau.

Beberapa kali lautan akan tampak berwarna seperti gelap atau coklat susu setelah ada badai.

Ini terjadi sebab angin dan arus laut yang akibat badai dapat mengkacaukan pasir dan sedimen dari sungai yang mengalir ke laut, pula akibat dari cahaya awan yang gelap (Ist).

Inspirasi Pantsuit ala Artis Bollywood, Sontek Yuk!



Celana Pantsuit menjadi opsi yang bagus untuk kamu untuk acara-acara formal maupun nonformal. Mari kita sontek padu padan gaya artis Bollywood dalam berbagai acara.



Pantsuit juga digunakan di berbagai musim. Tidak hanya menampilkan kesan elegan, celana model ini juga menunjukkan kepercayaan dirimu. Untuk menggunakan pantsuit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah warna, khususnya di musim hujan.

Dilansir dari Boldsky, beberapa selebriti Hollywood memamerkan beberapa pilihan warna pantsuit yang bisa kamu sontek untuk gayamu sehari-hari. Penasaran? Ini dia ulasannya!

Sonam Kapoor

Dalam suatu acara, Sonam Kapoor memilih pantsuit berwarna pink koleksi Calvin Klein. Pantsuit ini dipadukan dengan kemeja putih dan sepatu hitam. Ia juga menambahkan berapa aksesoris seperti cincin dan jam koleksi IWC Schaffhausen.

Deepika Padukone

Di perhelatan Cannes 2019, Deepika Padukone tampil keren dengan pantsuit motif garis biru dan putih koleksi Loewe. Jasnya terdiri dari blazer double-breasted dan celana lebar. Sang Diva melengkapi penampilannya dengan sepasang tumit

oranye runcing dan meninggikan penampilannya dengan sedikit kontur yang ditandai oleh alis tebal, mata berkerut, perona mata merah muda, dan bayangan bibir matte nudish-pink.

Kareena Kapoor

Pada acara India Today Conclave 2018, Kareena Kapoor datang dengan pantsuit berwarna putih yang menampilkan kesan stylish. Pantsuit koleksi Prabal gurung ini dipadukannya dengan celana flare berwarna senada. Penata busana Tanya Ghavri juga menambahkan sepatu hitam dan perhiasan yang minim pada busana Kareena Kapoor kali ini.

Sonakshi Sinha

Dalam promosi film Mission Mangal, Sonakshi Sinha menggunakan pantsuit



berwarna oranye koleksi Osman Yousefzada. Penata busana Mohit Rai menampilkan pantsuit dengan bralette. Jika mau dicoba, kamu bisa menggunakan kaus putih.

Sonakshi sendiri menggunakan sepatu karya Truffle Collection India untuk melengkapi pakaiannya. Ia juga menggunakan anting model hoops karya Studio Metallurgy dan cincin dari Flower Child koleksi Shaheen Abbas.



Taapsee Pannu

Dalam peluncuran trailer Soorma, Taapsee Pannu menggunakan pantsuit dengan warna kuning terang koleksi Narendra Kumar. Model pantsuit yang terbuka di depan dengan tangan panjang ini, Ia tidak menggunakan banyak perhiasan.(ist)

Pasien Surabaya (dari hal 1)

Jawa Timur (Jatim) khususnya Surabaya mendapat sorotan tajam saat wabah Covid-19 melanda. Selain jumlah kasusnya yang terus mendaki, 'perang urat saraf' antara Pemprov dan Pemkot menjadi 'bumbu pedas' tersendiri saat pandemi.

Kondisi pun makin runyam, karena secara statistik Jatim menjadi penyumbang terbesar indikator memburuknya corona di Indonesia. Setelah melampaui jumlah total kasus di DKI Jakarta—sebagai episentrum pertama corona di Indonesia—Jatim terus mencetak rekor penambahan terbesar.

Data per Kamis (2/7), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim mencatat penambahan 374 kasus dalam 24 jam. Sehingga total tercatat 12.695 orang. Data yang dilampirkan pemerintah menunjukkan kasus positif di Jatim hari ini lebih banyak dibanding Rabu (1/7) yang berjumlah 316 kasus. Sementara, jumlah pasien corona yang sembuh bertambah 192, total menjadi 4.391 orang. Adapun pasien meninggal bertambah 22 orang, sehingga menjadi 948 jiwa.

Kasus positif tertinggi kedua dialami oleh DKI Jakarta. Sebanyak 190 kasus baru terkonfirmasi, total menjadi 11.823 orang. Kasus sembuh bertambah 191 orang, sehingga menjadi 6.871 orang. Sedangkan pasien meninggal hari ini bertambah enam, total menjadi 638 jiwa.

"Jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan, ditambah juga jumlah testing yang semakin masif kita lakukan, dan sebagian dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di RS," ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Graha BNPB.

Hari ini, Indonesia mencatat penambahan kasus positif tertinggi, yakni 1.624 orang. Sebanyak 1.072 pasien sembuh dan 53 orang meninggal. Secara nasional, Indonesia memiliki 59.394 kasus positif, 26.667 pasien sembuh, dan 2.987 kasus kematian.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) di Pulau Galang bisa dimanfaatkan untuk pasien positif Covid-19 dari Surabaya, Jawa Timur.

"Kita akan pertimbangkan bersama-sama, ini untuk mengurangi beban rumah sakit yang ada di Surabaya khususnya di RSUD dr Soetomo," kata dia, melalui rilis yang diterima, Kamis (2/7). Kata Muhadjir, pasien dengan gejala ringan atau sedang bisa dikirim ke Rumah Sakit ini mengingat pasien positif Covid-19 di Jawa Timur khususnya dari Surabaya terus melonjak.

Mantan Menteri Pendidikan itu pun

meminta agar Panglima TNI berkoordinasi dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II dan Kepala Gugus Tugas Covid-19 berkaitan dengan teknis dan skenario pemanfaatan RSKI Pulau Galang untuk pasien dari Surabaya. "Untuk pasien yang ringan atau sedang akan dikirim ke Pulau Galang dengan transportasi yang sudah disiapkan TNI AU," kata dia.

Rumah Sakit Khusus Infeksi di Pulau Galang, Kepulauan Riau, khusus dibangun sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi ledakan kasus positif Covid-19. Rumah sakit ini terdiri dari 360 ruang rawat dengan 240 ruangan untuk orang dalam pemantauan (ODP), 100 ruangan untuk pasien dalam pemantauan (PDP) Namun, per 30 Juni, baru ada 53 pasien dirawat disana.

Meski begitu, Muhadjir menekankan RSKI Pulau Galang tidak tertutup untuk pasien dari luar Kota Pahlawan itu. "Karena memang arahan Presiden tidak harus Surabaya, sebetulnya. Tapi bisa saja dari luar. Terutama dari PMI (Pekerja Migran Indonesia), juga pasien dari Provinsi Kepri," kata dia.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepulauan Riau, Tjetjep Yudianto mengatakan pihaknya menyetujui untuk merawat pasien Covid-19 asal Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan saat video conference bersama para pejabat negara.

"Waktu itu kita video conference yang dipimpin oleh Menko PMK, Menko Polhukam, kemudian Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Ketua BNPB membahas ini. Tentu gugus tugas Kepulauan Riau yang waktu itu dipimpin pak Sekda dalam itu tersebut ya menyetujui," kata Tjetjep saat dihubungi, Kamis (2/7).

Dalam kesempatan itu, kata dia, telah diputuskan untuk membantu observasi dan perawatan bagi daerah lain yang masuk zona merah. RSKI Pulau Galang akan menyediakan 200 tempat tidur bagi pasien Covid-19 dari luar Kepulauan Riau. "Sekitar 200 tempat tidur yang akan bisa ditampung untuk pasien Covid-19 di luar Kepri," katanya. "(Rencana kapan diberangkatkannya?) Secara teknis tentu ada perlu kesepakatan lain yang perlu dilengkapi karena contohnya SDM itu perlu ditambah," sambungnya.

Menkes Mendadak ke RSUD Unair

Sementara, Menkes Terawan saat mengunjungi Surabaya terkesan menghindari dari media. Dalam kunjungannya yang mendadak, Walikota Tri Rismaharini mengajak Terawan mengunjungi Pasar Genteng. Usai meninjau pasar bersama Risma, Terawan lalu berkunjung ke Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya. Ia menggelar pertemuan tertutup bersama manajemen rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita.

Sayangnya, Terawan enggan memberikan

keterangan apapun kepada awak media yang telah menunggunya. Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke daerah lain.

Sebelumnya, terkait RSUD Surabaya media sosial tanah air dihebohkan dengan tulisan salah satu pasien yang mengeluhkan fasilitas di lokasi tersebut. seorang pasien Hamidah Soetadji atau Mimied saat itu menjalani isolasi di ruang HCU RSUD. Sang pasien menulis keluhan kondisi RSUD yang tidak banyak diketahui umum melalui media sosial. Perempuan tersebut saat ini dalam status pasien yang menunggu hasil sembuh.

"Dengan kondisi seperti dan status yang belum jelas, saya akhirnya dirawat di RS. Lantaran sesak dan gerak saya terbatas, akhirnya urusan ke toilet digantikan dengan pispot alat pipis untuk perempuan. Dua hari saya menggunakan itu. Sungguh itu menyiksa dan mengengaskan, Mak. Saya masih memaklumi kebebasan saya yang terengut lantaran menjadi suspect pasien covid. Saya masih bisa menerima berada dalam satu ruangan dengan lima pasien lain yang statusnya juga belum jelas. Saya masih bisa juga berdamai dengan keadaan lantaran tak ada hiburan seperti fasilitas televisi. Namun, satu-satunya hal yang tidak bisa saya terima adalah tidak ada toilet atau kamar mandi di ruang kami dirawat," kata Mimied yang pernah berkerja menjadi jurnalis itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama RSUD Surabaya, Prof Nasronudin membenarkan jika pada ruang ICU dan HCU tidak ada toilet. "Tapi menyikapi keinginan masyarakat seperti itu ya kita akan sediakan toilet dan menutup ruang tersebut," ujarnya saat di konfirmasi, Kamis (2/7).

Ruang HCU itu mirip dengan ICU tanpa ventilator dan pengawasan ketat dari tim medis. Pasien disana tidak bisa menikmati toilet, serta sengaja diberi pispot atau alat buang air portabel. Karena jika menggunakan toilet dikawatirkan bisa jatuh. Alat pispot ini disiagakan tiap pasien. Namun karena masuk ruang area invaksi, maka tidak tiap menit petugas masuk disitu. Petugas masuk untuk membersihkan pispot atau tisu berdasarkan jadwal.

Nasron mengatakan jika memang tidak bisa memuaskan semua masyarakat. Akan tetapi akan memperhatikan suara dan harapan masyarakat. "Sudah saya suruh belanja sore ini yg praktis saja beli kamar mandi dan toilet sudah ready jadi di ace hard ware. Perlu 4 set toilet untuk lt 6 dan lt 4. Pria dan wanita," ujarnya.

Nasron mengatakan jika pihaknya masih bingung mendapat dana dari mana. Akan tetapi ini adalah kebutuhan mendadak jadi ya harus disediakan. "Bayarnya belum tahu dari mana. Kita prioritaskan mendahulukan layanan masyarakat. Ini kan keperluan mendadak dan mendesak. Jadi yg settingnya satu atau dua hari harus jadi. Kalau ruang rawat inap ditutup terlalu lama ya kasihan yg antri di IGD," pungkasnya. (ist,ard)

KARTU PRAKERJA DIDUGA MALADMINISTRASI, ICW LAPORKAN KE OMBUDSMAN



Bundling pelatihan kartu prakerja dihentikan pasca mendapatkan protes dari berbagai pihak

Jakarta- Polemik mengenai program Kartu Prakerja masih berlanjut. Kini Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan sejumlah dugaan maladministrasi terkait program tersebut ke Ombudsman RI. Untuk diketahui, per Juli pemerintah pun menghentikan transaksi dan penjualan paket pelatihan secara bundling yang menjadi salah satu sorotan masyarakat.

"Hari ini, ICW melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman. Kami menyampaikan laporan ini secara langsung dan kami submit secara online," ujar peneliti ICW, Tibiko Zabar, di Gedung ORI, Jakarta, Kamis (2/7).

Biko menyatakan, pelaporan ini berkaitan polemik yang terjadi sejak program Kartu Prakerja diluncurkan dan pemerintah tetap meneruskannya di masa pandemi corona dengan mengubah menjadi semibansos.

Ia menilai apabila program Kartu Prakerja tak segera dihentikan, berpotensi merugikan kerugian negara sebagaimana kajian KPK. "Jika dikaji lebih mendalam ditemukan fakta bahwa program ini berpotensi merugikan keuangan negara, membiarkan praktik monopoli terjadi, hingga adanya nuansa konflik kepentingan. Sederhananya, jika program ini tetap dipaksakan berjalan maka dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," ucap Biko.

Sementara itu peneliti ICW lainnya, Wana Alamsyah, menyatakan dalam laporan tersebut pihaknya menyertakan 6 dugaan maladministrasi dalam program tersebut. Wana menyebut 6 poin di antaranya dugaan maladministrasi terkait pemilihan 8 platform digital seperti Ruangguru, Tokopedia, hingga Pintaria tidak sesuai Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3/2020.

"Dalam Perpres 36/2020 disebutkan perjanjian kerja sama harus dilakukan

setelah munculnya Permenko. Namun ketika kami telusuri perjanjian kerja sama muncul atau terjadi sebelum adanya Permenko," ucap Wana.

Dugaan maladministrasi selanjutnya yakni terkait mekanisme lelang program Kartu Prakerja. Menurut Wana, dalam program ini tak ada sistem lelang sesuai Perpres 16/2018. "Proses pemilihan platform seharusnya menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa, namun pemerintah tidak menggunakan mekanisme tersebut sehingga ini jadi salah satu potensi maladministrasi," kata Wana.

Poin dugaan maladministrasi lainnya, lanjut Wana, yakni terkait kurasi pelatihan online. Wana menyatakan terdapat peran ganda yang dilakukan platform digital. Sebab platform digital tidak hanya bertugas mengkurasi program pelatihan, tetapi juga mengadakan pelatihan.

Dari 850 pelatihan yang diidentifikasi, sebanyak 137 pelatihan merupakan milik lembaga pelatihan yang juga merangkap sebagai platform digital. Kajian KPK pun memperlihatkan hal serupa, bahwa ada konflik kepentingan karena dari delapan platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja, lima di antaranya juga bertindak sebagai lembaga pelatihan. "Jika diperinci, dari 1.895 pelatihan yang tersedia, 250 di antaranya merupakan milik lembaga pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," katanya.

Bundling Pelatihan Dihentikan

Untuk diketahui, beredar surat manajemen pelaksana (Project Management Office/PMO) yang meminta kepada mitra pelatihan untuk menghentikan transaksi dan penjualan paket pelatihan secara bundling.

"Paket yang dihentikan. Bukan pelatihan atau programnya. Jadi hanya boleh eceran.

Satu pelatihan. Tidak boleh lagi satu paket isi tiga pelatihan. Contohnya gitu," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Kamis (2/7).

Denni menjelaskan, penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program kartu prakerja. Setidaknya, ada dua hal utama yang menjadi hasil dari evaluasi tersebut. Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform.

Kedua, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan.

Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket tersebut. Surat keputusan ini ditujukan bagi mitra prakerja yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academy by Ruangguru dan Tokopedia (ist)

INDIKASI MALADMINISTRASI VERSI ICW

1. Tak sesuai ditempatkan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Mekanisme kurasi lembaga pelatihan dinilai tak layak dan mengandung konflik kepentingan.
3. Perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan platform digital dilakukan sebelum terbitnya Permenko 3 Tahun 2020.
4. Pemilihan platform digital dinilai tak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ).
5. Adanya peran ganda oleh platform digital yang merangkap sebagai lembaga pelatihan.
6. Pemilihan platform digital tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa.